BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik yang diintegrasikan pada matapelajaran PKn, sejalan dengan kedudukan dan peran siswa sebagai generasi muda yang dipersiapkan menjadi warga negara yang baik, demokratis, dan bertanggungjawab. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, para siswa harus mampu memecahkan masalah, apakah masalah mereka sendiri atau masalah yang ada di masyarakatnya. Oleh karena itu, para siswa harus dilatih untuk memecahkan masalah, termasuk ketika mereka menghadapi konflik yang disebabkan oleh isu-isu kontroversial kebijakan publik yang semakin meningkat intensitasnya seiring dengan proses demokratisasi saat ini.

Sementara itu fakta yang harus diakui, bahwa reformasi dan proses demokratisasi yang telah berjalan hingga saat ini di Indonesia, juga berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Partisipasi itu dilandasi paradigma baru yang menempatkan keseimbangan peranan antar sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat dalam kemitraan yang setara untuk menjalankan kepemerintahan dalam rangka pemenuhan kehidupan dasar masyarakat,

sehingga terjadi pergeseran paradigma penyelenggaraan negara dari paradigma pemerintah (*government*) menjadi paradigma pemerintahan (*governance)* dan mengarah kepada pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hal ini diduga selain karena faktor-faktor internal, juga dipengaruhi oleh kecenderungan globalisasi yang semakin kuat pengaruhnya. Globalisasi telah mempengaruhi munculnya tata hubungan masyarakat baru, struktur dan sistem ekonomi baru, bahkan persepsi budaya baru dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, misalnya berkembangnya tata nilai baru yang bersifat universal seperti demokrasi, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan hidup. Berbagai perubahan itu menuntut adanya kebijakan publik yang mampu mendorong masyarakat untuk mempertahankan eksistensi, pertumbuhan, perkembangan sistem kehidupan nasional, dan kelangsungan hidup suatu bangsa serta negara. Proses demokrasi sebagai salah satu konsekuensi globalisasi, juga menyangkut partisipasi warganegara dalam proses politik. Karena itu penyiapan warganegara agar mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab juga merupakan isu penting dalam proses demokratisasi.

Perubahan paradigma praktik penyelenggaraan negara dalam kaitannya dengan kebijakan publik, menimbulkan konsekuensi semakin banyak kebijakan publik yang dibuat pemerintah mendapatkan tanggapan

beragam dari masyarakat. Selain karena semakin meningkatnya kesadaran warganegara, juga karena para birokrat atau pejabat pemerintah memang dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Berdasarkan hal itu maka munculnya isu-isu kontroversial kebijakan publik semakin hari akan semakin kuat intensitasnya.

Tanggapan atau respon masyarakat terhadap suatu kebijakan publik, baik yang mendukung (pro) maupun yang menolak (kontra) sering diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang kontra produktif, bahkan anarkhis dan destruktif. Oleh karena itu diperlukan upaya sungguh-sungguh, untuk memahamkan siswa bagaimana proses atau mekanisme sistem kebijakan publik dalam sebuah tatanan masyarakat yang domokratis. Hal ini penting dilakukan terhadap para siswa yang masih belum sepenuhnya memahami bagaimana sistem kebijakan publik berlaku, disamping juga untuk menyiapkan mereka menjadi calon-calon pemimpin masa depan atau warganegara yang menguasai dengan baik mekanisme sistem kebijakan publik. Disinilah letak peran penting PKn, sebagai wahana pendidikan politik dan pendidikan demokrasi.

Upaya mempersiapkan siswa sebagai warganegara muda *(young citizens)* harus dimulai sedini mungkin, dan terintegrasi di dalam kurikulum matapelajaran sekolah. Matapelajaran PKn adalah salah satu matapelajaran yang secara khusus memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan warga negara yang baik, demokratis dan

bertanggungjawab, serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial secara konstruktif, termasuk memecahkan masalah-masalah yang berlatar kebijakan pemerintah. Matapelajaran PKn diharapkan mampu mengambil peran penting dan tanggungjawab dalam menyediakan pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik bagi siswa, sehingga pembelajaran PKn akan berada pada tradisi *reflektive inquiry*, dan bukan sekedar pada tradisi sebagai *citizenship transmission* ataupun sebagai *social sciences*.

Peran PKn tersebut sejalan dengan visi dan misi PKn sebagaimana dikemukakan Djahiri (2006:10) bahwa:

> Visi PKN NKRI adalah lahirnya manusia/WNI dan kehidupan masyarakat bangsa NKRI religius, cerdas, demokratis dan *lawfulness*, damai, tenteram, sejahtera, moderen dan berkepribadian Indonesia. Sedangkan misi yang diembannya adalah program pendidikan; yang membelajarkan dan melatih anak didik secara demokratis, humanistik, fungsional.

Setidaknya terdapat empat alasan mengapa isu-isu kontroversial kebijakan publik perlu diangkat dan diintegrasikan dalam pembelajaran PKn, yaitu: **Pertama**, dalam pembelajaran PKn khususnya yang menyangkut peran lembaga-lembaga negara dan partisipasi warganegara dalam pemerintahan, banyak materi yang masih mengandung kontroversi. **Kedua,** pembelajaran isu-isu kontroversial dapat digunakan guru untuk mengembangkan kemampuan persepsi, emosi, komunikasi, sikap positif dan keyakinan yang merupakan kemampuan dasar untuk mencegah berkembangnya sikap dan tindakan anarkhis. **Ketiga**, pembelajaran isu-isu kontroversial dapat digunakan untuk melatih kemampuan berpikir kritis

siswa, karena memungkinkan siswa berbeda pemahaman dan pandangan terhadap sebuah isu. **Keempat**, perbedaan pandangan di antara siswa, akan memberikan wawasan dan menanamkan kesadaran akan adanya perbedaan dalam kehidupan, sehingga pada akhirnya akan memiliki sikap demokratis dalam setiap aspek kehidupannya sesuai dengan realita kehidupan dalam masyarakat yang majemuk.

Pembelajaran isu-isu kontroversial sangat penting dikembangkan dalam pembelajaran, sebagaimana dikemukakan Somantri (2001:319) bahwa: "… maksud diberikannya kesempatan kepada guru untuk menyajikan bahan yang kontroversial itu ialah agar para siswa berlatih diri dalam memecahkan perbedaan pendapat diantara teman sekelasnya". Dengan membawa ke dalam kelas dan menjadikan isu-isu yang kontroversial tersebut sebagai bahan kajian, "akan melatih keterampilan berpikir siswa, melatih mengemukakan pendapat, mempertahankan pendapat, belajar berbeda pendapat, serta belajar menghormati dan menghargai pendapat orang lain" Hasan (1986: 202-204).

Pembelajaran PKn juga harus mempertimbangkan pengaruh globalisasi dan konsekuensi-konsekuensinya, dengan mengembangkan program pendidikan yang mampu mengakomodasikan semua kecenderungan globalisasi itu. Program pendidikan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk *"… a curriculum geared to the development of "world citizens" who are capable of dealing with the crises"* (Parker, *et.al.*

1999), yakni kurikulum yang diarahkan pada pengembangan warga dunia yang mampu mengelola krisis. Dalam kaitan ini pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik juga dapat dipandang sebagai bagian dari pengembangan kemampuan mengelola suatu krisis. Oleh karena itu pengembangan kurikulum dan pembelajaran Pkn harus mampu menjawab tantangan tersebut, namun tetap dalam kerangka sistem dan tujuan pendidikan nasional.

Program pendidikan nasional termasuk PKn, diharapkan dapat menjawab harapan dan tantangan yang akan dihadapi oleh anak bangsa baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Menurut Somantri (2001:299), Pendidikan Kewarganegaraan yang kiranya akan sesuai dengan karakteristik Indonesia adalah:

> Program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orangtua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis, dalam mempesiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pandangan lain mengenai hakikat PKn dikemukakan oleh Winatapura (2001:490), yang menyatakan "... pada hakikatnya merupakan pendidikan yang mengarah pada terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara Pancasila". Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan perkataan lain PKn merupakan pendidikan Pancasila dalam praktek. Secara konseptual

epistemologis, pendidikan Pancasila dapat dilihat sebagai suatu *integrated knowledge system* yang memiliki misi menumbuhkan potensi peserta didik agar memiliki "*civic intelligence*" dan *"civic participation"* serta *"civic responsibility"* sebagai warga negara Indonesia dalam konteks watak dan peradaban bangsa Indonesia yang ber-Pancasila.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006, tentang Standar Isi Kurikulum untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, disebutkan mengenai latar belakang pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar matapelajaran PKn, yaitu:

> ... Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pandangan lain dikemukakan Budimansyah (2008: 24) yang menjelaskan tiga kerangka paradigma mengenai pengembangan PKn, yaitu: "kerangka sistemik, kerangka teoritik, dan kerangka programatik". Kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar paradigma bahwa PKn secara kurikuler dirancang sebagai subyek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Sedangkan secara teoretik dirancang sebagai subyek pembelajaran yang

memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai *(content embedding values)* dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, dapat ditegaskan bahwa untuk mencapai pembelajaran PKn, harus dapat mengembangkan kompetensi kewarganegaraan secara utuh. Dalam hal ini Djahiri (2006:54) menyatakan "Pendidikan dan pembelajaran yang baik dan benar harus bersifat utuh, *kaffah*, baik dari sudut substansiil, prosedural maupun target harapan sasaran belajar (peserta didik dan kehidupannya)". Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembelajaran dikaji dari sudut peserta didik sebagai subjek sasaran didik adalah proses pembinaan dan pengembangan totalitas potensi diri manusia (fisik dan non fisik) secara utuh sehingga hakikat kodrati dirinya terbina, berkembang dan fungsional /berdaya guna *(empowered)* serta berbudaya *(civilized)* dalam kehidupannya.

Landasan dikembangkannya PKn di Indonesia selain sebagai wahana pengembangan potensi individu, adalah idealisme pembentukan

watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UUSPN secara khusus ditegaskan bahwa "Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Dalam konteks ini Pendidikan Kewarganegaran pada dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa.

Karakter warganegara yang diharapkan saat ini, tidak saja dipengaruhi oleh kepentingan nasional tetapi harus pula mampu mengakomodasi perkembangan global. Hal ini disebabkan warganegara tidak hanya hidup dalam lingkungan nasional tetapi juga hidup dengan bangsa lain dalam pergaulan internasional. Dengan demikian, karakter warganegara global, dewasa ini menjadi penting bagi perubahan konsep Pendidikan Kewarganegaraan.

Karakter warganegara Indonesia yang hendak dibentuk melalui PKn, juga dipengaruhi oleh kepentingan hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan jamannya pula. Cerminan dari karakter warganegara Indonesia tampak dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dirumuskan sejumlah tujuan pendidikan nasional yang pada hakekatnya

menunjuk pada sejumlah karakter warganegara yang diinginkan. Pasal 3, Undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

> Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Sekretariat Negara RI).

Kenyataan yang terjadi hingga saat ini pembelajaran PKn masih didominasi oleh cara-cara konvensional, sehingga pembelajaran menjadi kurang bermakna, membosankan dan monoton. Dengan demikian pembelajaran yang berorientasi pada konsep *"contextulized multiple intelligences"* masih jauh dari harapan. Menurut Somantri (2001: 245) bahwa kurang bermaknanya Pendidikan Kewarganegaran bagi siswa disebabkan "… masih dominannya penerapan metode pembelajaran konvensional seperti *ground covering technique*, indoktrinasi, dan *narative technique* dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sehari-hari".

Tujuan PKn adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warganegara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global, yang memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan. Kompetensi-kompetensi yang diperlukan menurut Branson (1999: 8-9) adalah "(1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu; (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris; (3)

pengembangan karakter dan sikap mental tertentu; dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional".

Berdasarkan kompetensi yang dikembangkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga komponen utama yang dipelajari dan dikembangkan dalam PKn yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge),* keterampilan kewarganegaraan *(civic skills),* dan watak kewarganegaraan *(civic dispositions)*.

Pengetahuan kewarganegaraan *(civic knowledge)* merupakan substansi materi yang harus diketahui oleh siswa sebagai warganegara. Pada prinsipnya, pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap warganegara adalah mengenai hak dan kewajibannya sebagai warganegara. Keterampilan kewarganegaraan *(civic skills)* adalah keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang dimiliki tersebut menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterampilan kewarganegaraan mencakup keterampilan intelekual *(intelektual skills),* dan keterampilan partisipasi *(participation skills).* Watak kewarganegaraan *(civic dispositions)* adalah sikap dan kebiasaan berpikir warganegara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi.

Selain tiga kompetensi kewargenagraan sebagaimana di kemukakan di atas, pembelajaran PKn juga harus mengembangkan rasa

kebangsaan dan cinta tanah air. Melihat kemajemukan karakteristik Indonesia, bentuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air untuk dikembangkan kepada siswa adalah yang tidak berdasarkan etnis, budaya, kewarganegaraan, dan struktural kenegaraan semata tetapi lebih kepada integrasi kesemuanya itu yang diperoleh secara alami menuju sebuah bangsa, dimana rasa persamaan identitas lebih dominan. Dalam konteks pembelajaran PKn, harus mengedepankan kesadaran siswa akan perlunya perlakuan yang adil dan demokratis dengan memberikan ruang hidup terhadap setiap unsur dan kelompok, suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat Indonesia.

Pandangan lain tentang komponen yang harus dikembangkan dalam pembelajaran PKn, Djahiri (2006:54) menyatakan:

> Untuk memenuhi tuntutan pembelajaran yang bersifat utuh/kaffah, tuntutan pembelajaran (substansial, prosedural dan *output orientation*) harus bersifat *multi dimensional (*domain-taxonomik; gatra kehidupan dan waktu) dan multi sumber, media, serta pola evaluasi. Dimensi afektual, dan khususnya nilai, moral, norma agama dan budaya harus dibelajarkan dengan baik, agar tidak kian banyak manusia dan kehidupannya yang kian tumpul dan minim pembekalan potensi afektualnya, sehingga terjadi erosi nilai-moral-norma.

Tuntutan kualitas pembelajaran PKn sebagaimana dikemukakan di atas harus dapat diwujudkan, oleh karena itu diperlukan inovasi guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Salah satunya adalah merancang dan menerapkan model pembelajaran yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan belajar siswa serta tuntutan dinamika eksternal di

dalam masyarakat, negara, dan dunia. Pembentukan kompetensi kewarganegaraan *(civic competencies)* yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan watak kewarganegaraan tersebut memerlukan usaha, bukan terbentuk dengan sendirinya. Salah satu usaha terebut adalah melalui pengembangan model pembelajaran PKn yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan.

Model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik diharapkan menjadi salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan pembelajaran PKn tersebut, yang meliputi tuntutan kebutuhan belajar siswa (individual-kelompok) dan tuntutan dinamika eksternal di masyarakat lokal, nasional, dan global. Untuk itu model pembelajaran yang dikembangkan harus menerapkan pendekatan dan strategi yang dapat mengakomodasi hal-hal tersebut.

Tuntutan kebutuhan belajar siswa baik secara individual maupun kelompok akan diakomodasi melalui pengembangan tujuan pembelajaran yang memenuhi tiga aspek pengetahuan, keterampilan, dan watak kewarganegaraan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan nilai moral Pancasila, dan pendekatan kontekstual, yang diterapkan melalui pemilihan strategi *Self-Regulated Learning* (SRL) dan *Cooperative Learning* (CL). Pemenuhan tuntutan dinamika masyarakat lokal, nasional dan global, akan diakomodasi melalui pemilihan konten (isi), yaitu isu-

isu kontroversial kebijakan publik yang dapat dipilih sendiri oleh siswa sebagai topik pembahasan.

Penggunaan pendekatan nilai dan moral Pancasila dalam model yang akan dikembangkan agar pembelajaran tetap berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Penggunaan pendekatan kontekstual dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan kurikulum yang saat ini berlaku, sedangkan pengembangan strategi pembelajaran yang memadukan *Self-Regulated Learning (SRL)* dan *Cooperative Learning (CL)* adalah untuk memenuhi tuntutan "kodrat siswa sebagai makhluk individu sekaligus sebagai mahkluk sosial" (Notonegoro, 1976).

Kemampuan siswa yang ingin dikembangkan melalui model pembelajaran ini adalah (1) pengembangan pengetahuan tentang kebijakan publik, (2) pengembangan kemampuan dasar mengenai isu-isu kontroversial kebijakan publik, (3) pengembangan sikap terhadap isu-isu kontroversial kebijakan publik, dan (4) pengembangan keterampilan menganalisis isu-isu kebijakan publik.

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa gagasan awal penelitian ini didasarkan pada keinginan meningkatkan kualitas pembelajaran matapelajaran PKn, khususnya di SMA yang **memenuhi empat karakteristik**, yaitu: (1) memenuhi unsur-unsur pendidikan nilai dan pendidikan politik/pendidikan demokrasi *(value and democracy education),* (2) ditujukan untuk kebutuhan pembangunan

watak bangsa (*nation and character building*), khususnya pengembangan rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan tuntutan perkembangan baik lokal, nasional, dan global, (3) dilakukan dengan suatu model atau pendekatan yang spesifik, dan (4) memenuhi tuntutan model pembelajaran berbasis kompetensi untuk melibatkan peran siswa jauh lebih aktif dalam melakukan proses belajar. Oleh sebab itu maka fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik yang memenuhi empat karakteristik tersebut, dan sesuai untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa.

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasar pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, selanjutnya dirumuskan masalah penelitian:

Model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik yang bagaimanakah yang dapat meningkatkan kompetensi kewarganegaraan berbasis rasa kebangsaan dan cinta tanah air siswa?

Berdasar rumusan masalah tersebut, selanjutnya dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian:

1. Bagaimanakah kondisi pembelajaran PKn di SMA yang ada saat ini dan upaya-upaya apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan

kompetensi kewarganegaraan berbasis rasa kebangsaan dan cinta tanah air siswa?

2. Bagaimanakah desain perencanaan pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik yang dapat meningkatkan kompetensi kewarganegaraan berbasis rasa kebangsaan dan cinta tanah air siswa?
3. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik yang dapat meningkatkan kompetensi kewarganegaraan berbasis rasa kebangsaan dan cinta tanah air siswa?
4. Bagaimanakah prosedur evaluasi pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik yang dapat meningkatkan kompetensi kewarganegaraan berbasis rasa kebangsaan dan cinta tanah air siswa?
5. Adakah perbedaan yang signifikan pada pengetahuan kewarganegaraan *(civic knowledge)* siswa antara yang menerapkan model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik dengan yang menerapkan model konvensional?
6. Adakah perbedaan yang signifikan pada keterampilan kewarganegaraan *(civic skills)* siswa antara yang menerapkan model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik dengan yang menerapkan model konvensional?

7. Adakah perbedaan yang signifikan pada watak kewarganegaraan *(civic disposition)* siswa antara yang menerapkan model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik dengan yang menerapkan model konvensional?
8. Adakah perbedaan yang signifikan pada rasa kebangsaan dan cinta tanah air siswa antara yang menerapkan model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik dengan yang menerapkan model konvensional?
9. Bagaimanakah tanggapan siswa dan guru terhadap implementasi model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik yang dikembangkan?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat demikian luas dan kompleknya konsep-konsep mengenai isu-isu kontroversial, kebijakan publik, model pembelajaran, dan kompetensi kewarganegaraan, maka perlu dilakukan pembatasan-pembatasan.

1. Isu-isu kontroversial yang akan dipilih sebagai bahan kajian siswa pada prinsipnya tidak dibatasi sesuai dengan keinginan peneliti atau guru, melainkan menyesuaikan kebutuhan, minat, perhatian, atau keinginan siswa. Namun demikian dalam proses pembelajaran, guru tetap akan menjaga prinsip-prinsip pembelajaran isu-isu kontroversial yang dikemukakan Stradling

(1984:5-9) yaitu: seimbang *(balance),* (2) netralitas (*neutrality),* dan (3) tanggungjawab *(commitment).* Demikian pula dengan lingkup (*scope*) isu yang dipilih, boleh pada lingkup terendah, misalnya RT/RW, sekolah, hingga lingkup nasional bahkan global.

2. Model pembelajaran yang akan dikembangkan secara khusus akan menerapkan kombinasi strategi *Self-Regulated Learning* (SRL) dan *Cooperative Learning* (CL). Kombinasi ini dimaksudkan untuk memberikan ciri khas model pembelajaran PKn yang seimbang antara pengembangan aspek individu dan sosial sesuai dengan sifat kodrat manusia. Sedangkan pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan kontekstual dan pendekatan nilai moral Pancasila. Pendekatan kontekstual mendasari pemilihan isu-isu kontroversial kebijakan publik yang akan dikaji dalam pembelajaran, sedangkan pendekatan nilai moral Pancasila digunakan untuk mendasari proses pengembangan komponen-komponen pembelajaran.
3. Kompetensi kewarganegaraan siswa meliputi tiga komponen, yaitu pengetahuan kewarganegaraan *(civic knowledge),* keterampilan kewarganegaraan *(civic skills),* dan watak kewarganegaraan *(civic dispositions).* Mengingat luasnya, maka akan disederhanakan dengan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis maupun pedagogis siswa SMA.

Penyederhanaan dan penyesuaian akan lebih mengutamakan pada kesesuaiannya dengan tingkat berpikir siswa dan kesesuaiannya dengan lingkup kehidupan sehari-hari mereka.

4. Spektrum konten (isi) pengetahuan kewarganegaraan *(civic knowledge)* dibatasi pada pemahaman masalah mendasar yang dimiliki siswa tentang "Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" yang merupakan salah satu Standar Kompetensi sebagaimana termuat dalam Kurikulum PKn tahun 2006.
5. Spektrum isi keterampilan kewarganegaraan *(civic skills)* terdiri dari keterampilan intelektual dan keterampilan partisipatoris. Spektrum keterampilan intelektual dibatasi pada kemampuan untuk membaca dan memahami informasi tentang kebijakan publik atau masalah-masalah atau isu-isu kebijakan publik seperti yang ditemukan dalam media, untuk membedakan antara fakta dengan opini dalam teks tertulis, dan mengartikulasikan konsep abstrak. Sedangkan spektrum keterampilan partisipatoris dibatasi pada kemampuan partisipasi umum dan kemampuan pemecahan masalah.
6. Spekrum isi watak kewarganegaraan *(civic disposition)* dibatasi pada keadaban (*civility*), empati, sikap kepemimpinan sesuai pengalaman siswa, pengambilan pandangan (perspektif),

hubungan masyarakat, peran dalam masyarakat, dan sikap positif terhadap kehidupan masyarakat yang heterogen.

7. Spektrum isi rasa kebangsaan dan cinta tanah air dibatasi pada implementasinya dalam kehidupan sehari-hari siswa, yaitu di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan dalam konteks kehidupan bernegara, yang mengedepankan perlakuan yang adil dan demokratis dengan memberikan ruang hidup terhadap setiap unsur dan kelompok, suku, agama, ras dan golongan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pembatasan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kondisi pembelajaran PKn yang ada di SMA saat ini dan upaya-upaya apa yang sudah dilakukan guru untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan berbasis rasa kebangsaan dan cinta tanah air siswa.
2. Menemukan desain perencanaan pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik yang dapat meningkatkan kompetensi kewarganegaraan berbasis rasa kebangsaan dan cinta tanah air siswa.

3. Menemukan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik yang dapat meningkatkan kompetensi kewarganegaraan berbasis rasa kebangsaan dan cinta tanah air siswa.
4. Menemukan prosedur evaluasi pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik yang dapat meningkatkan kompetensi kewarganegaraan berbasis rasa kebangsaan dan cinta tanah air siswa.
5. Membuktikan ada tidaknya perbedaan yang signifikan pada pengetahuan kewarganegaraan *(civic knowledge)* siswa antara yang menerapkan model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik dengan yang menerapkan model konvensional.
6. Membuktikan ada tidaknya perbedaan yang signifikan pada keterampilan kewarganegaraan *(civic skills)* siswa antara yang menerapkan model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik dengan yang menerapkan model konvensional.
7. Membuktikan ada tidaknya perbedaan yang signifikan pada watak kewarganegaraan *(civic disposition)* siswa antara yang menerapkan model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik dengan yang menerapkan model konvensional.
8. Membuktikan ada tidaknya perbedaan yang signifikan pada rasa kebangsaan dan cinta tanah air siswa antara yang menerapkan

model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik dengan yang menerapkan model konvensional.

9. Memperoleh gambaran mengenai tanggapan siswa dan guru terhadap adaptasi dan implementasi lebih luas model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik yang dikembangkan.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian dan pengembangan ini akan menghasilkan pedoman umum implementasi model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik yang berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

   Hasil penelitian ini akan menjadi salah satu model yang bermanfaat bagi pengembangan matapelajaran PKn selanjutnya, khususnya pengembangan pembelajaran PKn sebagai pendidikan nilai, pendidikan demokrasi, dan pendidikan untuk pembangunan watak dan karakter bangsa.

2. Secara praktis

   a. Bagi guru matapelajaran PKn, akan menjadi acuan dalam mengembangkan model-model pembelajaran kreatif-inovatif, khususnya yang berkaitan dengan materi-materi pembelajaran yang kontroversial.

b. Bagi siswa penerapan model pembelajaran ini akan menumbuhkan suasana pembelajaran yang demokratis, dinamis, aktif, dan menyenangkan, yang memungkinkan pencapaian kompetensi PKn sebagaimana diiharapkan.

F. Asumsi-asumsi

Asumsi-asumsi yang mendasari penelitian ini adalah:

1. Proses demokratisasi yang menjadi salah satu isi pembelajaran PKn, menyangkut partisipasi warganegara dalam proses politik. Karena itu penyiapan warganegara agar mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab juga merupakan isu penting dalam proses demokratisasi saat ini. Salah satu upaya mempersiapkan warganegara tersebut adalah melalui pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik dalam matapelajaran PKn.
2. Sikap dan perilaku demokrasi harus dipelajari dan dialami. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi dalam arti luas memegang peran strategis, karena secara langsung menyentuh sasaran potensial kewarganegaraan yang demokratis untuk berbagai usia. Proses demokratisasi harus dikembangkan bukan hanya untuk

berdemokrasi hari ini, tetapi lebih jauh lagi untuk berdemokrasi di hari esok.

3. Kemampuan siswa menyeimbangkan posisinya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial melalui strategi pembelajaran *self-regulated learning* dan sekaligus *cooperative learning* akan menentukan keefektifan pembelajaran PKn dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan. Dengan *Self-Regulated Learning* (SRL) siswa akan dapat mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang mandiri, percaya akan kemampuan diri sendiri, dan memiliki kebebasan untuk berkreasi dan berkarya sesuai dengan kemampuan diri, dan kemampuan menilai diri sendiri. Sedangkan melalui C*ooperative Learning* (CL) siswa akan belajar mengembangkan kemampuannya sebagai warga negara yang mampu menghargai perbedaan, kerjasama, dan memiliki komitmen kuat dalam mencapai tujuan bersama sebagai sebuah bangsa.
4. Pembentukan kompetensi kewarganegaraan siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan watak kewarganegaraan berbasis rasa kebangsaan dan cinta tanah air memerlukan usaha. Salah satu usaha tersebut adalah melalui pembelajaran PKn yang bermakna, yaitu yang sesuai dengan hakikat dan tujuan PKn. Oleh karena itu diperlukan pengembangan model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik.

5. Rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang ada dalam diri setiap siswa akan mengalami pasang surut sesuai dengan pengaruh dinamika kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik yang dikembangkan akan menjadi salah satu wahana guna memupuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air siswa.

G. Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka hipotesis kerja (Ha) penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik yang dikembangkan telah memenuhi prinsip-prinsip pengembangan model pembelajaran, dan dapat menemukan desain perencanaan yang tepat untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan berbasis rasa kebangsaan dan cinta tanah air siswa.
2. Model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik yang dikembangkan telah memenuhi prinsip-prinsip pengembangan model pembelajaran, serta dapat menemukan langkah-langkah pelaksanaan yang tepat untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan berbasis rasa kebangsaan dan cinta tanah air siswa.

3. Model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik yang dikembangkan telah memenuhi prinsip-prinsip pengembangan model pembelajaran, serta dapat menemukan prosedur evaluasi yang tepat untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan berbasis rasa kebangsaan dan cinta tanah air siswa.
4. Terdapat perbedaan yang signifikan pada pengetahuan kewarganegaraan *(civic knowledge)* siswa antara yang menerapkan model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik dengan yang menerapkan model konvensional.
5. Terdapat perbedaan yang signifikan pada keterampilan kewarganegaraan *(civic skills)* siswa antara yang menerapkan model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik dengan yang menerapkan model konvensional.
6. Terdapat perbedaan yang signifikan pada watak kewarganegaraan *(civic disposition)* siswa antara yang menerapkan model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik dengan yang menerapkan model konvensional.
7. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasa kebangsaan dan cinta tanah air siswa antara yang menerapkan model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik dengan yang menerapkan model konvensional.

8. Model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik yang dikembangkan dihipotesiskan memperoleh tanggapan baik dari siswa dan guru untuk diadaptasi dan dikembangkan lebih luas dalam pembelajaran PKn di SMA.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERPUSTAKAAN